

## REPRODUKSI IDEOLOGI PADA BUKU TEKS SOSIOLOGI SMA KURIKULUM 2006 DAN 2013

Naufal Mamduh  
Program Studi Pendidikan  
Sosiologi, Fakultas Ilmu  
Sosial, Universitas Negeri  
Jakarta

Rakhmat Hidayat  
Program Studi Pendidikan  
Sosiologi, Fakultas Ilmu  
Sosial, Universitas Negeri  
Jakarta

**ABSTRAK.** Artikel ini fokus pada dua aspek penting, (1) praktik reproduksi ideologi negara dalam buku ajar sosiologi untuk sekolah menengah atas dalam kurikulum 2006 dan 2013 lalu (2) konteks sosial politik dalam kurikulum 2006 dan 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti, studi literatur, wawancara mendalam dan analisis framing dengan model Gamson dan Modigliani. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa konteks dalam kurikulum 2006 adalah kebijakan otonomi daerah, pemilihan pada tahun 2004 dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Karenanya konteks dalam kurikulum 2013 adalah bonus demografi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dari analisis framing, ditemukan beberapa wacana dominan seperti multikulturalisme, globalisasi, kearifan lokal dan ideologi dominan seperti stabilitas sosial dan harmoni masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa buku teks sosiologi SMA merupakan bagian dari aparatur negara ideologis dengan ideologi dominan membentuk siswa dan semuanya dimaksudkan untuk mengabadikan status quo dari kelas penguasa.

**Kata kunci:** Reproduksi, Ideologi, Negara, Buku, Sosiologi

**ABSTRACT.** This article focus on two important aspects, (1) the practice of state ideology reproduction in sociology textbook for high school in the curriculum of 2006 and 2013 then (2) the social politic context in curriculum 2006 and 2013. This research using qualitative approaches such as, literature study, deep interview and framing analysis with Gamson and Modigliani model. The result of studies conducted shows that context in curriculum 2006 is regional autonomy policy, the elections in 2004 and Millenium Development Goals (MDGs). Thereover context in curriculum 2013 is a demographic bonus and ASEAN Economy Community (AEC). From framing analysis, has found some of dominant discourse like multiculturalism, globalization, local wisdom and dominant ideology like social stability and harmony of society. Conclusion this research show that sociology textbooks high school a part of ideological state apparatus with ideology dominant to form student and all intended to perpetuating the status quo of the ruling classes.

**Keywords:** Reproduction, Ideology, State, Book, Sociology

## PENDAHULUAN

Pendidikan tidak bisa lepas dari kepentingan pemerintah dan ideologi yang ada didalamnya. Sejak era pra kolonial hingga kemerdekaan Indonesia yang sudah berumur lebih dari 60 tahun, bisa dilihat bahwa kegiatan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari kepentingan politik. Seperti kala rezim Orde Baru berkuasa. Orde Baru yang berjalan selama 32 tahun di Indonesia memiliki banyak kenangan didalamnya. Sebagai sebuah rezim yang berjalan cukup lama, Orde Baru membawa beragam cerita yang paradoks. Pelanggaran HAM seperti penahanan, pembantaian dan penculikan bersanding dengan geliat pembangunan ekonomi yang sempat membuat Indonesia menjadi macan Asia dengan kemampuannya melakukan swasembada beras. Pada masa Orde Baru kebijakan pendidikan juga muncul seperti pergantian kurikulum dan munculnya mata pelajaran didalamnya seperti mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang dimulai sekitar tahun 1975 (Bunyamin, 2008:135). Sedangkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dimulai sekitar tahun 1985 (Depdikbud, 1985). Pasca Orde Baru tumbang, dinamika pendidikan masih belum terlepas dari gejolak politik. Mulai dari adanya perubahan kurikulum 2002 sampai 2013 sekarang. Semuanya menciptakan gejolak dalam kegiatan pendidikan khususnya pada mata pelajaran yang ada di sekolah khususnya di mata pelajaran Sosiologi. Kajian mengenai reproduksi ideologi negara di sekolah sangat menarik karena salah bentuk dari kajian kritis mengenai pendidikan. Karena dengan konsep tersebut, akan terungkap bagaimana kegiatan pendidikan lagi-lagi memiliki muatan politis dari negara. Sebagai pemegang kuasa dalam kegiatan pendidikan khususnya sekolah, negara bisa leluasa memberikan sebuah upaya pembentukan diri masyarakat sehingga ketika lulus dari sekolah bisa rukun menjadi bagian dari masyarakat dan jika stabilitas di masyarakat terbentuk maka legitimasi sebuah rezim kekuasaan pada negara bisa terjaga.

Fokus penelitian ini adalah pada substansi yang terdapat dalam buku teks Sosiologi SMA Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Dengan menggunakan konsep reproduksi ideologi dari Louis Althusser dan analisis framing model Gamson dan Modigliani. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti bagaimana praktik reproduksi ideologi terjadi pada buku teks Sosiologi SMA seperti ide sentral apa yang sering muncul serta yang konteks sosial ekonomi politik yang terjadi pada tahun 2004 sampai 2013 yang diteliti untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi politik yang berpengaruh pada praktik reproduksi ideologi negara pada buku teks. Dari latar belakang yang ditulis maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut (1) bagaimana aspek sosial politik dan ekonomi yang melatarbelakangi dalam pelaksanaan pelajaran sosiologi SMA Kurikulum 2006 dan 2013 (2) Bagaimana praktik reproduksi ideologi terjadi pada buku teks sosiologi SMA Edisi Kurikulum 2006 dan 2013

## KAJIAN LITERATUR

### IDEOLOGI DALAM PERSPEKTIF MARXIAN

Pandangan Ideologi dalam perspektif Marxian dimulai dari relasi produksi dan kelas sosial. Menurut Karl Marx kelas sosial yang berkuasa secara ekonomi atau yang biasa disebut sebagai kelas dominan memiliki kekuasaan yang tidak hanya bersifat materil seperti kepemilikan alat produksi saja tetapi juga mengarah pada kekuatan idea atau mental. Pada relasinya terdapat ketertundukan para kelas pekerja kepada kelas dominan pemilik alat produksi karena mereka mengalami penundukan secara mental. Bisa dikatakan bahwa kelas dominan tidak hanya mendominasi praktik kerja tetapi juga menguasai kesadaran masyarakat khususnya kelas pekerja (Abercrombie, 1980:7). Praktik ekonomi kapitalis selain membutuhkan para pekerja juga membutuhkan stabilitas. Maksudnya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan maka dibutuhkan stabilitas dan Marx melihat cara aktor kapitalis menciptakan stabilitas dengan menguasai kesadaran para pekerja. Dengan menjauhkan para pekerja dengan realitas rill caranya adalah menciptakan kesadaran palsu agar tidak memberontak. Kesadaran palsu ini ditafsirkan oleh Antonio Gramsci sebagai hegemoni. Pandangan Gramsci tentang hegemoni adalah dengan cara melihat adanya praktik kontrol politik yang menurut Gramsci lebih dari sekedar tindakan represif tetapi persuasi yang mengecoh bahkan cenderung ideologis. Praktik hegemoni seakan menjadi penyeimbang apabila ada tindakan berupa paksaan dan persetujuan yang juga mengecoh agar tercipta lagi-lagi kestabilan atau kontrol maksimal (Abercrombie, 1980:12).

Dari pemikiran Karl Marx dan Gramsci bisa dikatakan bahwa dalam perspektif Marxian ideologi didefinisikan sebagai alat untuk menciptakan kesadaran palsu baik yang sifatnya ekonomi seperti pendapat Karl Marx ataupun politik

seperti Gramsci. Selain itu ideologi juga berfungsi sebagai alat kontrol kelas penguasa atau dominan kepada kelas pekerja untuk menciptakan stabilitas. Pandangan mengenai ideologi dalam perspektif Marxian semakin terlihat kala menjelaskan pandangan negara dalam perspektif Marxian yaitu tidak lebih dari kepanjangan tangan kelas ekonomi berkuasa sehingga untuk mengtransmisikan ideologinya, kelas dominan meminta bantuan negara sehingga lahirlah pemikiran Louis Althusser tentang aparatus negara yang akan peneliti tuliskan dalam kerangka konsep selanjutnya. Konsep mengenai ideologi dan kelas dominan bisa dijabarkan dalam beberapa poin yaitu (1) Ada ideologi dominan, di masyarakat walaupun harus diperhatikan juga apakah semua ideologi yang ada di masyarakat kesemuanya dominan atau tidak. (2) kelas dominan akan mendapatkan dampak dan manfaat dari ideologi dominan tersebut. (3) ideologi dominan akan “menyatukan” kelas pekerja atau bawah khususnya membuat mereka menjadi diam secara politik sehingga menjadi stabil. (4) Mekanisme yang ideologi ditransmisikan harus cukup kuat untuk mengatasi kontradiksi dalam struktur masyarakat kapitalis<sup>1</sup>. (Abercrombie,1980:29)

### **NEGARA SEBAGAI APARATUS KELAS BERKUASA**

Konsep reproduksi ideologi negara, diawali dengan pandangan Althusser tentang negara. Althusser melihat negara sebagai apparatus represif (Althusser,2007:159) Negara memiliki makna yaitu kekuasaan negara. Maksudnya, dalam negara selalu terjadi pertentangan seputar kepemilikan kekuasaan negara oleh kelas dominan sehingga jika negara sudah dimiliki oleh kelas sosial tertentu maka segala kegiatan negara tidak melebihi dari kepentingan kelas tertentu tersebut. Dari konsep negara Althusser mendedah konsep dari reproduksi kelas pekerja. Menurut Althusser proses reproduksi kelas pekerja yang dilakukan oleh pemodal ataupun pemilik pabrik adalah dengan memberikan gaji atau upah yang berguna untuk membangun kembali tenaga kerja seperti dengan upah bisa digunakan untuk membeli makanan, pakaian dan tempat tinggal (Althusser,2014:49). Tetapi Althusser tidak hanya melihat bahwa praktik reproduksi terjadi bukan hanya terjadi secara materil seperti upah. Althusser melihat ada alat untuk mereproduksi anak-anak pekerja tersebut untuk membentuk dirinya sebagai bagian dari kelas pekerja tersebut. Maksudnya adalah ada pembentukan yang merupakan bagian dari praktik reproduksi tersebut dengan melakukan pembentukan agar para pekerja menjadi “kompeten” dan dalam praktiknya maka kegiatan pemenuhan syarat tenaga kerja agar bisa menjadi kompeten tersebut adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah dengan sistem kapitalis (Althusser,2014:50).

Pandangan Althusser mengenai reproduksi ideologi melahirkan dua konsep yaitu Repressive State Apparatus (RSA) dan Ideological State Apparatus (ISA). Menurut Althusser ISA berbeda dengan RSA. Jika RSA wujudnya adalah pemerintah, birokrasi, tentara, polisi, peradilan, penjara dan sebagainya maka ISA menurut Althusser adalah Gereja/lembaga keagamaan, institusi pendidikan atau sekolah, keluarga, hukum, politik seperti sistem partai, serikat buruh, media massa dan kebudayaan (Althusser,2007:167-168). Ada perbedaan antara RSA dengan ISA seperti jika RSA lebih bersifat publik, maka ISA bersifat privat. Kemudian jika RSA menjalankan fungsinya dengan kekerasan maka Althusser mengatakan bahwa ISA menjalankan fungsinya dengan ideologi. Kemudian, apabila apparatus represif negara membentuk sebuah totalitas terorganisir yang didalamnya terdapat kesatuan tugas maka, ISA sifatnya lebih beragam dan relatif otonom. Dan terakhir jika kesatuan dari apparatus represif atau RSA dilanggengkan oleh organisasi-organisasi yang tersentralistik maka ISA dilanggengkan dalam bentuk yang berbeda-beda walaupun berada dalam satu kepentingan yaitu ideologi kelas yang berkuasa. Praktek reproduksi ideologi yang terjadi di sekolah menghasilkan para pekerja baik yang menjadi korban dari reproduksi ideologi di sekolah untuk meredam kesadaran masyarakat agar status quo bisa terus berjalan.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pada pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari makna subjektif seperti simbol, deskripsi kasus dan tanda bermakna lainnya. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : Pertama studi pustaka yang dilakukan untuk meneliti data primer dari penelitian yang akan dibahas. Berbagai pustaka yang akan dianalisa dalam penelitian ini pertama adalah buku teks Sosiologi SMA baik yang merupakan Kurikulum 2006 ataupun 2013 serta pada sumber artikel dari media massa seperti koran atau dokumen lain. Kedua wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendukung penggunaan analisis wacana kritis yang dilakukan untuk lebih memperdalam data. Berikutnya teknik pengumpulan

1 Ibid, hlm 29

data ketiga, yaitu dengan analisis framing. Secara sederhana analisis framing dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai oleh media, baik media cetak maupun media elektronik. Pembingkaiannya tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Analisis framing dilakukan kepada buku teks sosiologi SMA Kurikulum 2006 yaitu dari BSE terbitan Pusurbuk dan Esis, Erlangga untuk kurikulum 2013.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### SEMANGAT DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN: AWAL TERBENTUKNYA KURIKULUM 2006

Kurikulum pasca reformasi tidak terlepas dari konteks yang ada saat itu. Semangat demokrasi yang lahir memberikan ruang kepada daerah. Maksudnya ada kesempatan daerah untuk bisa mengembangkan sendiri secara mandiri. Semua aspek sangat terpengaruh oleh semangat kebebasan tersebut. Seperti pada aspek pendidikan. Kurikulum 2006 hanya berjarak dua tahun dari kurikulum 2004. Pada kurikulum tersebut otonomi pendidikan mulai digaungkan untuk disempurnakan di kurikulum 2006. Adanya peraturan perundang-undangan yang hadir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi salah satu tonggak munculnya Kurikulum 2006. Pada Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pemerintah menetapkan "Standar Nasional Pendidikan" dan juga membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP yang bertugas untuk menyusun panduan penyusunan KTSP sedangkan daerah atau satuan pendidikan mengacu pada panduan tersebut untuk mengembangkan kurikulum (Herry,2014:88). Kurikulum 2006 memberikan ruang kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan muatan lokal dalam pendidikan. Selain itu adanya panduan dari BSNP bisa membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah jikalau ada kebingungan ketika mengembangkan Kurikulum 2006. Setiap kebijakan kurikulum tidak mungkin tanpa ada landasan hukumnya. Begitu juga dengan KTSP ada beberapa landasan hukum dari KTSP seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada undang-undang tersebut terdapat Standar Nasional Pendidikan yang harus ditingkatkan secara bertahap dan berencana. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang dikembangkan berdasarkan SK Lulusan SKL dan Standar Isi atau SI. SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sedangkan SI adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang ditungkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Mulyasa,2010:26). Lalu ada juga Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang SI dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang pendidikan. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang SK Lulusan dan Permendiknas No. 24 Tahun 2006 yang

Tabel 1. Gambaran Umum tentang Kurikulum 2006

Latar Belakang	•	Semangat Demokrasi,
	•	Kebijakan Otonomi Daerah
	•	Standarisasi Pendidikan
Tujuan	•	Meningkatkan mutu pendidikan melalui inisiatif sekolah.
	•	meningkatkan kepedulian warga sekolah tentang pendidikan.
Dasar Hukum	•	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
	•	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
	•	Permendiknas No.22 Tahun 2006
	•	Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang SK Lulusan
	•	Permendiknas No. 24 Tahun 2006

Sumber: Diolah dari beberapa sumber (2016)

mengatur tentang pelaksanaan SKL dan SI.

### **KONTEKS KURIKULUM 2006: OTONOMI DAERAH SAMPAI PEMBANGUNAN MILLENIUM**

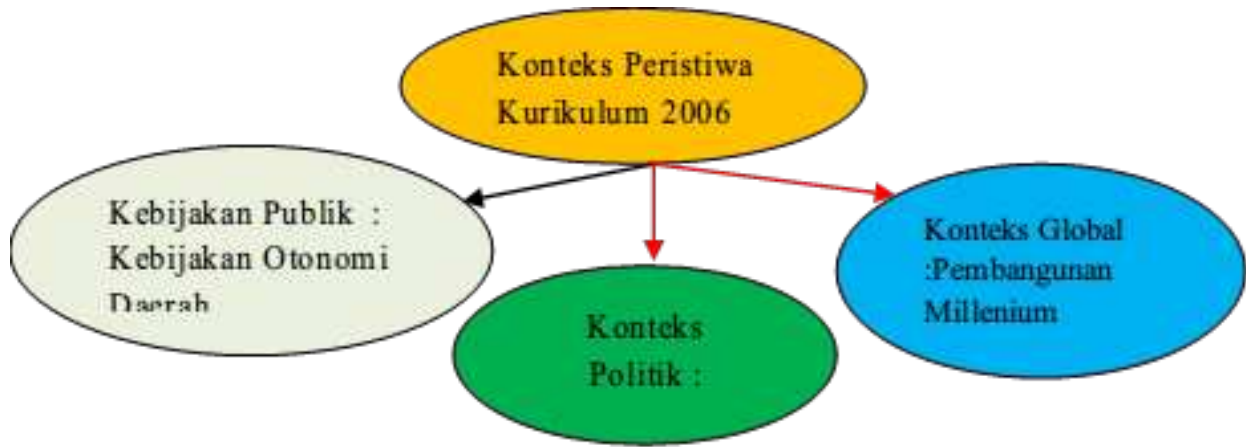
Kurikulum tidak bisa lepas dari kondisi yang ada di masyarakat. Pada subab ini penulis akan menjabarkan tentang konteks apa saja atau peristiwa apa saja yang ada di sekitar Kurikulum 2006. Konteks yang ada dalam Kurikulum 2006 salah satunya adalah kegiatan Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut Pemilu tahun 2004. Sebuah kegiatan demokrasi yang terjadi pada awal reformasi. Secara historis Indonesia memang sudah beberapa kali melakukan kegiatan Pemilu. Mulai dari era awal kemerdekaan hingga sekitar tahun 1997. Tetapi Pemilu tahun 2004 menjadi bersejarah karena menjadi kegiatan demokrasi pasca dinamika politik pasca reformasi yang sangat kompleks terjadi. Pemilu tahun 2004 memang memiliki banyak perbedaan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama, pemilih bisa memilih secara langsung anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, adanya lembaga baru yang disebut Dewan Perwakilan Daerah. Ketiga, Adanya Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bebas dari pengaruh Pemerintahan dan Partai Politik. Keempat, dalam memilih pencoblos memilih tanda gambar partai dan nama calon anggota DPR dan DPRD. Kelima, mencoblos foto calon anggota DPD. Keenam, pemilih memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) (Romli, 2004:03). Selain pemilu ada juga konteks kebijakan publik. Pasca lengsernya rezim Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun yang melahirkan era baru dalam kondisi sosial politik Indonesia yang menghasilkan beberapa kebijakan yang berusaha membalikan rezim sebelumnya. Soeharto sebagai presiden memiliki kekuasaan yang sentralistik. Munculnya kebijakan otonomi daerah di Indonesia bisa terlihat pada penerapan mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Pada undang-undang tersebut ada tiga faktor yang ditekankan yaitu memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi DPRD (Kaloh, 2002:48).

Sederhananya, otonomi daerah adalah kebijakan mengenai ruang untuk daerah dalam menentukan arah pembangunan sendiri atau desentralisasi. Misalnya seperti dalam mengatur anggaran daerah, pemasukan daerah, sistem politik dan juga pendidikan. Salah satu aspek lain adalah pada kegiatan pembangunan millennium. Pada tahun 2000, Indonesia beserta pemimpin dunia lainnya bertemu di New York dan menandatangani "Deklarasi Millennium" yang berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Ada beberapa tujuan pembangunan diantaranya pendidikan, kesehatan dan kemiskinan Indonesia bersama Negara-negara lainnya menetapkan target-target yang mesti dicapai pada 2015 atau istilah pembangunan millennium lebih dikenal dengan Millennium Development Goals (MDGs)<sup>2</sup>. Ada 8 target atau tujuan dari pembangunan millennium yaitu (1) memberantas kemiskinan (2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, adapun target yang ingin dicapai adalah memastikan pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Tujuan dari pembangunan millennium ketiga adalah (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (4) Menurunkan angka kematian anak dengan target yaitu menurunkan angka kematian balita (5) Meningkatkan kesehatan ibu dengan target menurunkan angka kematian ibu (6) Memerangi HIV dan AIDS, Malaria serta penyakit lainnya dengan target menghentikan dan mulai membalikan tren penyebaran HIV dan AIDS pada 2015 (7) adalah memastikan kelestarian lingkungan dengan target memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan sumber daya alam, dan (8) Promote Gloal Partnership For Development atau sederhananya peningkatan kerjasama dengan Negara lain untuk pembangunan. (Stalker, 2008:35). Demikian kiranya konteks yang menyertai dalam Kurikulum 2006 untuk lebih jelas penulis gambarkan dalam skema berikut.

---

<sup>2</sup> Millennium Development Goals (MDGs) adalah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Fokus dari paradigma pembangunan tersebut adalah pada hak asasi manusia, kemiskinan, kesetaraan gender, penyakit seperti HIV/AIDS dan Malaria, kelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan.

Skema 1. Ragam Konteks Kurikulum 2006



Sumber: Hasil Analisis (2016)

**KURIKULUM 2013: MEMBENTUK SISWA BERKARAKTER**

Secara historis Kurikulum 2013 dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu yaitu Muhammad Nuh, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terdapat beragam landasan dalam Kurikulum 2013, seperti landasan filosofis berupa pancasila yang memberikan prinsip dasar dalam pendidikan, serta filosofi pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Landasan yuridis dari Kurikulum 2013 berupa PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2010-2014 Sektor Pendidikan, tentang Perubahan Metodologi Pembelajaran dan Penataan Kurikulum, dan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa (Mulyasa,2015:64). Selanjutnya, nampak terlihat bahwa tujuan dari Kurikulum 2013 adalah menghasilkan manusia Indonesia yang kreatif, inovatif dan afektif sehingga implementasi Kurikulum 2013 difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara konseptual (Mulyasa,2015:65). Lebih jelasnya, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. Gambaran Umum tentang Kurikulum 2013

Latar Belakang	•	Evaluasi Kurikulum 2006
	•	Merespons kebutuhan zaman
	•	Urgensi pembentukan karakter peserta didik
Tujuan	•	Menghasilkan manusia Indonesia yang kreatif, inovatif, dan efektif
	•	Fokus kurikulum pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik
Dasar Hukum	•	PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
	•	RPJMN 2010-2014 Sektor Pendidikan
	•	INPRES Nomor 1 Tahun 2010

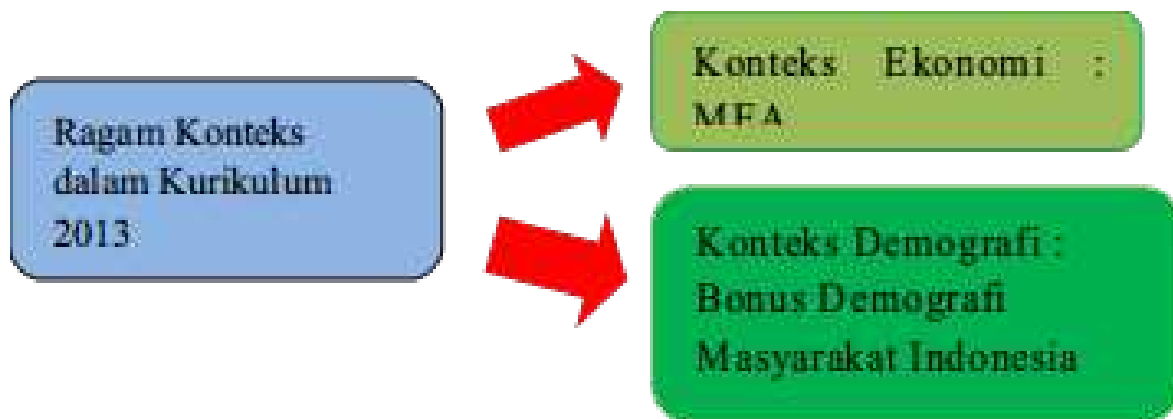
Sumber: Diolah dari beberapa sumber (2016)

### RAGAM KONTEKS KURIKULUM 2013: BONUS DEMOGRAFI DAN MEA

Proyeksi yang disajikan oleh hasil Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, penduduk Indonesia yang berusia dibawah 15 tahun hampir tidak bertambah, sementara, pada periode tahun 1970-1980an berjumlah sekitar 60 juta dan hingga akhir tahun 2000 penduduk dalam kelompok usia ini hanya meningkat menjadi 63-65 juta jiwa. Sebaliknya, penduduk usia 15-64 tahun pada tahun 1970 jumlahnya mencapai 63-65 juta dan telah berkembang menjadi lebih dari 133-135 juta atau mengalami kenaikan dua kali lipat selama 30 tahun (Maryati,2015:125). Hal ini berdampak pada tingkat ketergantungan penduduk. Secara sederhana jika jumlah penduduk angkatan kerja meningkat tajam atau jumlahnya lebih banyak dari angkatan tidak bekerja yang pertumbuhannya lambat maka angka ketergantungan menjadi kecil. Bonus Demografi juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan maksimal karena jumlah angkatan kerja yang melimpah seperti memberikan dana pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendirikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan beberapa hal lain seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, perlu adanya kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar kerja, keterbukaan perdagangan dan peningkatan akses tabungan dan investasi nasional. Konteks lain munculnya Kurikulum 2013 ada juga mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN selanjutnya disebut dengan MEA<sup>3</sup>. Sebuah visi yang dilakukan oleh Negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Dengan berlakunya MEA 2015 berarti negara-negara ASEAN menyepakati perwujudan integrasi ekonomi yang mengacu pada AEC Blueprint (Atep,2015:252).

3 MEA adalah sebuah pola integrasi ekonomi antara Negara di Asia Tenggara sehingga menghilangkan hambatan-hambatan dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan barang, jasa dan investasi.

Skema 2. Konteks yang menyertai Kurikulum 2013



Sumber: Hasil Analisis (2016)

**MELANGGENGKAN STATUS QUO: IDEOLOGI UTAMA BUKU TEKS SOSIOLOGI**

Hasil analisis framing kepada Buku Teks Sosiologi Edisi Kurikulum 2006 dan 2013, ditemukan beragam frame atau wacana dominan disana. Ada tiga wacana dominan yang terdapat pada Buku Teks Sosiologi Edisi Kurikulum 2006 dan 2013 yaitu globalisasi, multikulturalisme dan kearifan lokal. Pada subab ini peneliti akan menjelaskan posisi wacana tersebut dan mengintrepetasikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Di buku teks sosiologi yang dianalisis, wacana tentang multikulturalisme menjadi tema yang cukup dominan dalam buku teks sosiologi di Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Pada Buku Teks Sosiologi Edisi Kurikulum 2006 wacana tentang multikulturalisme terdapat pada bab 5 kelas XI. Dalam struktur buku diawali dengan pengertian kelompok sosial yang kemudian dilanjutkan dari mulai pengertian masyarakat multikultur sampai faktor-faktor penyebab. Hampir sama dengan Buku Teks Sosiologi Edisi Kurikulum 2006 pada Buku Teks Sosiologi Edisi Kurikulum 2013 wacana multikulturalisme juga berada di kelas XI pada bab 3. Buku ini bukan mengawali pada konsep kelompok sosial tetapi dari konsep yang lebih struktur dan juga kultur. Materi tentang stratifikasi berpadu dengan diferensiasi serta terdapat juga materi tentang struktur sosial dalam bab yang sama. Ditambah dengan sedikit materi tentang kesetaraan, harmoni sosial lalu diakhiri dengan konsep masyarakat multikultural.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Framing

Buku Mata Pelajaran Sosiologi Edisi 2006	Buku Mata Pelajaran Sosiologi Edisi Kurikulum 2013
<i>Frame Idea</i>	
Perbedaan Bukan Masalah Sosial	Menciptakan Harmoni Sosial di Masyarakat
Menciptakan Masyarakat Multikultural di Indonesia	Paham Multikulturalisme Sebagai Solusi
Dampak Buruk Globalisasi	Globalisasi Sebagai Masalah Sosial
Globalisasi Sebagai Ancaman Bagi Jati Diri Bangsa	Komunitas Lokal Bisa Menghadapi Globalisasi
	Mendamaikan Globalisasi dan Kearifan Lokal
	Kesetaraan Sebagai Nilai Terbaik di Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis (2016)

Di buku teks sosiologi, framing juga menyajikan wacana tentang globalisasi yang cukup dominan baik di Buku Teks Sosiologi Edisi Kurikulum 2006 dan 2013. Wacana globalisasi pada Buku Teks Sosiologi Edisi Kurikulum 2006 pada bab 2 kelas XII. Secara konten isi ada subab materi yang tidak hanya membicarakan globalisasi secara langsung tetapi juga ada materi tentang disorganisasi, disintegrasi dan untuk materi globalisasi dianggap berpengaruh terhadap jati diri bangsa. Pada Buku Teks Sosiologi Edisi Kurikulum 2013 hampir sama. Materi yang berisi konten Globalisasi berada di bab 2 kelas XII. Perbedaannya, dalam bab ini dijelaskan lebih detail dan kontekstual dengan memberikan materi tentang gejala globalisasi di Indonesia ditambah materi yang menghubungkan globalisasi dan komunitas lokal. Pada hasil framing, peneliti menemukan bahwa globalisasi dibingkai dalam wacana yang beragam. Ada yang sifatnya melihat dampak buruk dari globalisasi sampai menghadapkan komunitas lokal. Globalisasi merupakan fenomena sosial yang terjadi sekarang. Pada buku teks sosiologi 2006 dampak globalisasi bisa mempengaruhi jati diri bangsa. Sedangkan di Buku Teks Sosiologi Edisi Kurikulum 2013 lebih mendalam. Konten materi tentang dampak dari globalisasi mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi, urbanisasi dan pencemaran lingkungan. Kemunculan materi tentang kearifan lokal menjadi penyeimbang dari globalisasi tersebut.

Berdasarkan interpretasi peneliti frame idea mengenai multikulturalisme, globalisasi dan kearifan lokal tidak lebih dari bagian praktik ideologis yang menciptakan kesadaran kepada masyarakat agar mereka tunduk dan tetap stabil demi melanggengkan status quo.



Tabel 4. Wacana Dominan dan Nilai Yang Ada Pada Wacana Tersebut

Kurikulum	Wacana Dominan	Nilai Yang Ditanamkan
Kurikulum 2006	Multikulturalisme	- Perbedaan yang ada bukan menjadi masalah - Masyarakat Multikultural bisa diterapkan di Indonesia
	Globalisasi	- Globalisasi bisa menciptakan masalah sosial - Globalisasi bisa menjadi ancaman bagi bangsa
Kurikulum 2013	Multikulturalisme	- Menciptakan harmoni di masyarakat yang beragam - Menjaga kesetaraan seluruh elemen masyarakat - Multikulturalisme sebagai solusi
	Globalisasi	- Globalisasi menjadi masalah di masyarakat
	Kearifan Lokal	- Komunitas lokal masyarakat mampu menghadapi globalisasi - Globalisasi dan kearifan lokal bisa berdampingan

Sumber: Hasil Analisis (2016)

Skema 3. Ideologi Tersembunyi pada Buku Teks



Sumber: Hasil Analisis (2016)

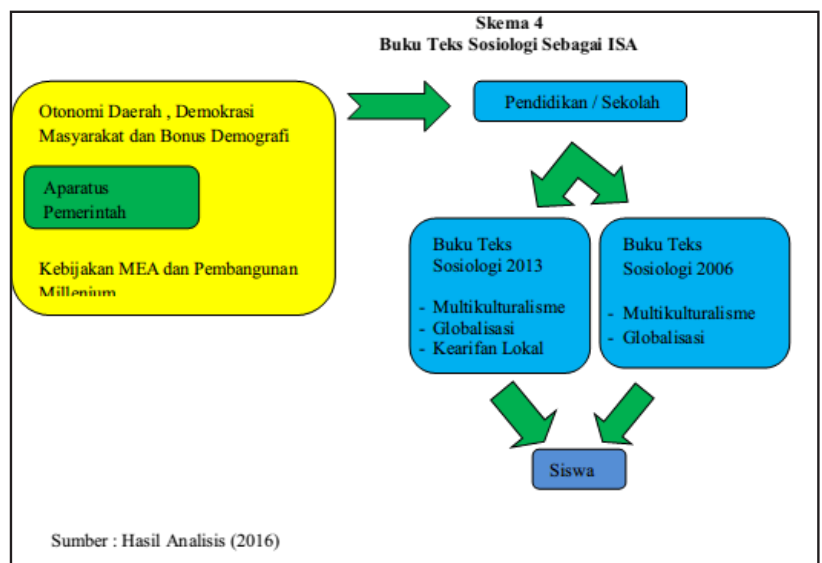
### BUKU TEKS SOSIOLOGI SEBAGAI BAGIAN ISA (IDEOLOGICAL STATE APARATUS)

Di Kurikulum 2006 konteks dan latar belakang kemunculannya tidak jauh dinamika otonomi daerah serta pembangunan. Berbeda dengan kurikulum 2013 yang tidak bisa terlepas dari isu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta persaingan global. Latar belakang dan konteks dari kedua kurikulum secara tidak langsung berkaitan dengan materi yang ada pada buku teks sosiologi kurikulum 2006 dan 2013. Berdasarkan hasil framing peneliti di buku teks sosiologi selain materi yang sifatnya teoritik ada juga beberapa materi konseptual dan praktis yang peneliti framing seperti tentang Masyarakat Multikultur, Integrasi dan Disintegrasikan Sosial, Globalisasi dan Kearifan Lokal. Pada buku teks Kurikulum 2006 terdapat pada materi tentang integrasi dan disintegrasikan sosial dan masyarakat multikultur. Sedangkan pada Kurikulum 2013 terdapat materi tentang masyarakat multikultur, globalisasi dan kearifan lokal. Materi tersebut juga berada di posisi dan bentuk tertentu. Pada hasil yang ditemukan ada dua bentuk penempatan materi tersebut. Pertama berada dalam subbab akhir yang sifatnya refleksi karena biasanya di awal bab penjelasan secara teoritik. Kedua yaitu menyatukan materi konseptual tersebut. Misalnya materi tentang masyarakat multikultur dikaitkan dengan harmoni sosial dan kesetaraan.

Adanya materi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah untuk membentuk kesadaran masyarakat mengenai fenomena sosial yang ada sehingga bisa meredam konflik dan menjaga stabilitas. Secara kritis latar belakang Kurikulum 2006 dan 2013 merupakan bentuk dari aparatus negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Louis Althusser dalam teorinya mengatakan bahwa kapitalis membutuhkan proses penyegaran kembali agar terciptanya para tenaga kerja baru. Pendidikan dalam hal ini sekolah menjadi ISA (Althusser, 2007:75 ; Tim Driyarkara, 1993: 56). Kecenderungan bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bagian dari ISA juga diamati oleh Sosiolog Pendidikan yaitu Paulus Wiratomo. Pada wawancara peneliti dengan Paulus Wiratomo, Sosiolog Pendidikan dari Universitas Indonesia tersebut berpendapat bahwa kecenderungan pendidikan mengarah kepada praktik ISA yang dikonsepsikan oleh Louis Althusser.

“Punya kecenderungan itu. Hampir selalu ada kecenderungan itu. Tetapi tingkat kesadaran masyarakat juga bisa mulai berkembang supaya pendidikan tidak terlalu dijajah oleh negara. Tapi kecenderungan itu sangat besar. Karena bagaimanapun yang namanya sekolah, sekolah itu kan formal itu memang sangat tujuan politisnya sangat besar. Dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu civil society harus tetap bisa mengembangkan kebebasan. Makanya kita harus mengkritik pemerintah untuk bisa melawan.”<sup>4</sup>

Kehadiran wacana dominan pada buku teks sosiologi yang peneliti temukan bahwa penyadaran akan realitas sosial masyarakat tidak lebih dari upaya aparat pemerintah agar masyarakat tetap stabil. Konsep masyarakat multikultur diharapkan agar masyarakat toleran dan konflik tidak terjadi sehingga pembangunan ekonomi bisa tetap berjalan. Bisa dirunut bahwa pendidikan sebagai ISA memiliki latar belakang tentang konteks global ataupun dinamika yang terjadi di masyarakat. Pendidikan menangkap momen tersebut dan bertugas untuk membentuk siswa yang kelak akan menjadi bagian dari pembangunan negara dan kebutuhan ekonomi pasar. Wacana dominan pada buku teks yang peneliti framing hadir menjadi bagian dari ISA di pendidikan yang dirancang oleh pemerintah, sebagaimana tampak dalam skema berikut ini.



<sup>4</sup> Kutipan wawancara peneliti dengan Paulus Wiratomo pada tanggal 17 Oktober 2016. Beliau adalah sosiolog Universitas Indonesia yang berfokus pada kajian tentang pendidikan dan pembangunan.

## PENDIDIKAN KONTEKSTUAL : “JEMBATAN” REPRODUKSI IDEOLOGI NEGARA

Reformasi melahirkan suatu wacana yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Sesuatu yang dianggap barang mewah pada saat Orde Baru, sekarang sudah menjadi realitas yang kita rasakan ataupun lakukan sampai sekarang. Masyarakat bebas mengutarakan pendapatnya baik dalam bentuk lisan dan tulisan. Pers yang pada masa Orde Baru mendapat banyak tekanan dari pemerintah sekarang bisa leluasa mengulas topik apa saja dan kita pun bisa menulis opini di media massa (Julie & Patrick, 2013 : 109 ; Tim Tempo, 1999 : 35-37). Kurikulum 2006 dan 2013 berada pada masa kebebasan berpendapat dan berserikat terjadi sehingga seperti yang sudah disinggung bahwa pada masa itu peran pemerintah tidak terlalu kuat terhadap masyarakat. Konsepsi pun terlihat untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pendidikan dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching Learning selanjutnya disebut CTL yang menjadi “jembatan” merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupannya sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Evaline & Hartini, 2010:177; Baharudin & Makin, 2011:210). Pendekatan kontekstual dalam pendidikan membawa siswa untuk melihat realitas sosial yang ada di sekitar.

### SIMPULAN

Hasil studi ini menunjukkan bahwa Kurikulum 2006 dan 2013 memiliki konteks sosial dan politik yang berbeda. Kurikulum 2006 merupakan peralihan dari kurikulum 2004 dan pada Kurikulum 2006 masih terasa sekali semangat reformasi didalamnya. Kurikulum 2013 juga memiliki konteks waktu yang cukup berbeda dengan Kurikulum 2006. Pada Kurikulum 2013 terdapat konteks yang sifatnya visioner seperti Bonus Demografi dan MEA. Pendidikan di Indonesia berada dalam kekuasaan pemerintah. Dibentuknya kurikulum, pendirian sekolah dan standarisasi pendidikan menjadi kebijakan pemerintah yang berada di pendidikan seperti sekolah. Pada kegiatan pembelajaran di sekolah terdapat buku teks mata pelajaran. Buku teks tersebut berada dalam tingkatan kelas di sekolah dan juga mata pelajaran misalnya pada mata pelajaran sosiologi. Selanjutnya dalam studi ini menunjukkan bahwa terdapat wacana dominan pada buku teks sosiologi seperti pada Kurikulum 2006 yaitu multikulturalisme dan globalisasi serta pada Kurikulum 2013 terdapat tiga wacana dominan yaitu multikulturalisme, globalisasi dan kearifan lokal yang menyembunyikan ideologi dominan yaitu tentang stabilitas sosial dan masyarakat harmoni yang kesemuanya bertujuan untuk membentuk siswa dengan kesadaran palsu tersebut agar status quo kelas berkuasa bisa terus bertahan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku dan Tesis

- Althusser, Louis. 2007. *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi*. Yogyakarta : Resist Book
- \_\_\_\_\_. 2014. *On the Reproduction of Capitalism : Ideology and Ideological State Apparatuses*. London : Verso
- Abercrombie, Nicholas, Stephen Hill & Bryan S. Turner. 2010. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_. 1980. *The Dominant Ideology Thesis*. London : Routledge Library Editions : Social Theory
- Adhi, Ramadhan. 2005. *Globalisasi : Skenario Mutakhir Kapitalisme*. Bogor : Al Azhar Press
- Atmasasmita, Romli et.al. 2004. *Apa, Mengapa dan Bagaimana Pemilihan Umum 2004*. Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informasi
- Baharudin & Makin. 2011. *Pendidikan Humanistik : Konsep, Teori dan Aplikasi Praksis dalam Dunia Pendidikan*. Jogjakarta : Ar-ruzz Media
- Creswell, W John. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Elisanti, Tintin Rostini. 2009. *Sosiologi 2 : Untuk SMA/MA Kelas XI IPS*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

- \_\_\_\_\_. 2009. *Sosiologi 3 : Untuk SMA/MA Kelas XII IPS*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Eriyanto. 2012. *Analisis Framing : Kontruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta : LKis Group
- Hidayat, Rakhmat. 2008. *Kurikulum Sebagai Kontestasi Kekuasaan : Critical Discourse Analysis Terhadap Kurikulum Sosiologi Dan Buku Pelajaran Sosiologi SMA Berdasarkan Kurikulum 2006 Dan Kurikulum 1984*. Tesis. Departemen Sosiologi : FISIP UI (tidak dipublikasikan)
- Kaloh, Johan. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta : Rieka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2014. *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Esis, Erlangga
- Kusuma, Murti Sari. 2002. *Wacana Ideologi Negara Dalam Pendidikan (Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku-buku Teks Pendidikan untuk SD dan SLTP antara tahun 1975-2001)*. Tesis. Departemen Komunikasi : FISIP UI (tidak dipublikasikan)
- Mangun, Sigit Wardoyo. 2013. *Pembelajaran Konstruktivisme : Teori dan Aplikasi Pembelajaran dalam Pembentukan Karakter*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Malasevic, Sinisa. 2004. *The Sociology of Ethnicity*. London : Sage Publications
- Maryati, Kun & Juju Suryawati. 2014. *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XI Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Esis, Erlangga
- Mulyasa, Enco. 2014. *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung : Remaja R Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 2010. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan : Suatu Panduan Praktis*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 2015. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 2014. *Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung : Rosda Karya
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmoderen*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sarimaya, Farida. 2008. *Sertifikasi Guru : Apa, Mengapa dan Bagaimana?*. Bandung : Yrama Widya
- Siregar, Evaline & Hartini Nara. 2010. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya
- Southwood, Julie & Patrick, Flanagan. 2013. *Teror Orde Baru : Penyelewengan Hukum dan Propaganda 1965-1981*. Depok: Komunitas Bambu
- Stalker, Peter. 2008. *Lets Speak Out for MDGs*. Jakarta : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
- Surachman, Eman. 2015. *Bahan Ajar Manajemen Pendidikan : Berorientasi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bahan Ajar. Departemen Sosiologi : FIS UNJ
- Tempo, Tim. 1999. *Pendapat : Kumpulan Tulisan Pada Rubrik Monitor Majalah Berita Mingguan TEMPO*. Jakarta : Pusat Data Analisa Tempo
- Tim Redaksi Driyarkara. 1993. *Diskursus Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Widyastono, Herry. 2014. *Pengembangan Kurikulum Di Era Otonomi Daerah : Dari Kurikulum 2004, 2006 ke Kurikulum*

2013. Jakarta : Bumi Aksara

### Jurnal Nasional dan Media Massa

- Abdurofiq,Atep.2014. Menakar Pengaruh MEA 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia dalam Jurnal Salam Vol 1 No 2. (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1543/1297> diakses tanggal 27 Juli 2016)
- Dodi,Mi'raj Kurniawan dan Andi, Suwirta.2016.Ideologisasi Konsep Reformasi dalam Histografi Buku Teks Pelajaran Sejarah di Sekolah. Jurnal Mimbar Pendidikan Vol 1 No 1<http://www.mindamas-journals.com/index.php/mimbardik/article/view/424/422> (Diakses tanggal 23 April 2016)
- Martono,Nanang .2012. Deskrispi Habitus Dalam BSE IPS Sekolah Dasar dalam Jurnal Socia Vol.11 No.2 <http://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/3610/3087> (Diakses tanggal 23 April 2016)
- Maryati,Sri.2015. Dinamika Pengangguran Terdidik : Tantangan Menuju Bonus Demografi di Indonesia dalam Jurnal Economica Vol.3 No.3 ([http://ejournal.stkip-pgri sumbar .ac.id/index.php/economica/article/view/249/pdf\\_55](http://ejournal.stkip-pgri sumbar .ac.id/index.php/economica/article/view/249/pdf_55) Diakses tanggal 23 Juli 2016)
- Maulipaksi,Desliana. 2015. Mendikbud : Evaluasi Kurikulum 2013 Sudah Tuntas dalam laman resmi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 30 Desember <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/12/mendikbud-evaluasi-kurikulum-2013-sudah-tuntas> (Diakses tanggal 8 September 2016)
- Pasandra,Sjamsi.2004.Desentralisasi Pendidikan dan Masalah Pemberdayaan Sekolah dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 11 No 2 <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/92/1427> (diakses tanggal 12 Agustus 2016)
- Rochana,Totok.2012.Relevansi Kurikulum Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Dengan Kebutuhan Mengajar Guru SMA dalam Jurnal Komunitas Vol 4 Nomor 2 <http://ournal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2417/2470> (Diakses tanggal 17 Juni 2016)
- Straubhaar,Rolf.2014. Social reproduction in non-formal adult education : the case of rural Mozambique in *Ethnography and Education Journal* Vol. 9 No.1 <http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=9363daf7-263a-4e5c-8d3c-7fb92a16ac37%40sessionmgr4005&vid=2&hid=4201> (Diakses tanggal 5 Mei 2016)
- Subkhan. 2013. Kurikulum 2013, Buku Penunjang tak Gratis dalam Tempo.co Selasa 27 Agustus <https://m.tempo.co/read/news/2013/08/27/079508003/kurikulum-2013-buku-penunjang-tak-gratis> (Diakses tanggal 8 September 2016)
- Suryadinata,Leo. 2003. Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa : Dari Asimilasi ke Multikulturalisme dalam Jurnal Antropologi Indonesia Nomor 71 <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3464/2744> (diakses tanggal 26 Desember 2016)
- Yusuf,Amir.2007. Kesiapan Sekolah Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam Jurnal Lembaran Ilmu Kependidikan Jilid 36 Vol 2 Desember. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/LIK/article/view/530/487> (Diakses tanggal 31 Agustus 2016)
- Zaini,Moh.2010.Kebijakan Ujian Nasional : Kajian Kritis Politik Pendidikan dalam Jurnal Salam Vol 13 No 1. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/456/463> (diakses tanggal 30 Agustus 2016)